

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Istilah akuntansi dapat diartikan suatu kegiatan jasa yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan terkait entitas ekonomi yang dimaksudkan supaya berguna untuk mengambil keputusan ekonomi serta membuat pilihan - pilihan nalar diantara berbagai alternatif tujuan tindakan (Abdul Haalim, 2002:32)

Arti akuntansi menurut para ahli: Rudianto, Akuntansi ialah suatu sistem informasi yang menghasilkan laporan keuangan untuk suatu pihak-pihak terkait yang berkepentingan dengan kegiatan ekonomi dan keadaan suatu badan usaha tertentu.

Accounting Principles Board, Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang mempunyai manfaat untuk menyediakan suatu informasi kuantitatif terutama yang sifatnya keuangan yang kemudian bisa digunakan untuk pengambilan suatu keputusan ekonomi.

Akuntansi juga merupakan sebuah media atau alat komunikasi dalam dunia keuangan, dimana penerapan akuntansi yang berlaku dan digunakan di setiap perusahaan atau instansi pemerintah itu berbeda. Perbedaan tersebut tergantung pada jenis

dan besar kecilnya suatu perusahaan atau tingkatan suatu instansi pemerintah

2.1.2 Pengertian Akuntansi Pemerintah

1. Akuntansi Pemerintahan.

Akuntansi pemerintahan secara umum disebut sebagai akuntansi sektor publik. Berdasarkan organisasi akuntansi, diantaranya meliputi instansi pemerintah, BUMN/BUMD dan organisasi nirlaba lainnya.

Berikut beberapa pengertian akuntansi pemerintahan.

Revrisond Baswir (2000:7), Akuntansi Pemerintahan merupakan bidang akuntansi yang berhubungan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba. meskipun lembaga pemerintah berukuran besar, namun sebagaimana dalam perusahaan dia tergolong sebagai lembaga mikro.

Menurut Bahtiar Arif (2002:3) mengartikan

Akuntansi pemerintahan dapat didefinisikan sebagai aktivitas pemberian jasa yang menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian serta pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah sistem penafsiran atas informasi keuangan.

Selain pengertian yang dapat digunakan sebagai acuan dasar dalam pemahaman, gambaran umum terkait karakter dan

tujuan dari akuntansi pemerintahan juga penting dalam menentukan apa yang ada dalam bidang keuangan suatu instansi pemerintahan atau organisasi nirlaba.

2. Karakteristik Akuntansi Pemerintahan.

Mengetahui beberapa hal atau unsur dalam karakteristik dapat membantu untuk memahami tentang organisasi pemerintahan atau organisasi sektor publik.

Menurut *Revrisondoo Baswir (2000)*, karakteristik akuntansi pemerintahan sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat pencatatan laba-rugi dikarenakan tujuan yang utama lembaga pemerintah bukanlah mencari laba.
- b. Tidak perlu dilakukan pencatatan pemilikan pribadi sebab lembaga pemerintah merupakan milik seluruh rakyat dan kepemilikan itu tidak dituliskan dalam sebuah surat bukti kepemilikan.
- c. Bentuk akuntansi pemerintahan tidak sama dengan suatu Negara dengan Negara yang lain tergantung dari bentuk Negara yang bersangkutan..
- d. Penyelenggaraan akuntansi pemerintahan tidak bisa dipisahkan dengan mekanisme pengurusan keuangan serta sistem anggaran setiap Negara disebabkan fungsi akuntansi pemerintahan adalah untuk menyediakan informasi terkait realisasi pelaksanaan anggaran suatu negara.

Sedangkan menurut IMuhammad Gade (2002), karakteristik akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Menggunakan istilah dana (*fund*) sehingga akuntansi pemerintahan bisa disebut juga sebagai akuntansi dana. Pengertian “dana” disini adalah satuan akuntansi dan *fiscal* (*fiscalalant iaccountingekentity*) dengan seperangkat buku besar yang mencatat kas, sumber-sumber keuangan selain kas, kewajiban-kewajiban, sisa/ saldo modal beserta perubahan-perubahan yang dipisahkan untuk melaksanakan kegiatan khusus.
- b. Tidak ada model atau desain utama untuk akuntansi pemerintahan karena sangat dipengaruhi oleh peraturan dan hukum yang berlaku di Negara tersebut.

Penjelasan lebih detail atas tujuan akuntansi pemerintahan dimasukkan dalam penjelasan berikut ini.

3. Tujuan Akuntansi Pemerintahan.

Pada umumnya tujuan akuntansi pemerintahan adalah menyajikan informasi untuk pengambil keputusan tentang kejadian-kejadian ekonomi yang penting dan mendasar dan membantu mempersiapkan informasi terhadap bagaimana cara mereka mengalokasikan sumber-sumber yang serba terbatas seperti modal, tenaga kerja, tanah serta bahan baku guna mendapatkan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah.

Abdul halim (2007:35) menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan mempunyai beberapa tujuan, antara lain :

a. Pertanggungjawaban

Tujuan pertanggungjawaban adalah memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, teliti dalam bentuk dan waktu yang tepat serta berguna bagi pihak yang bertanggungjawab terhadap operasi unit-unit pemerintahan.

b. Manajerial

Tujuan manajerial berarti akuntansi pemerintah berhak menyediakan informasi keuangan yang diperlukan sebagai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran serta perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan penilaian kinerja pemerintah.

c. Pengawasan

Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah berhak memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Menurut Deddi Nordiawan (2006:7) akuntansi pemerintahan mempunyai tiga tujuan yaitu :

a. Tujuan pertanggungjawaban

Pemerintah wajib memberikan informasi keuangan secara lengkap serta memberikan informasi keuangan secara cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat.

b. Tujuan manajerial

Yaitu memberikan informasi keuangan kepada perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran dan perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan penilaian kinerja pemerintah merupakan tujuan yang diharapkan dapat dicapai dengan adanya akuntansi pemerintah.

c. Tujuan pengawasan

bahwa informasi yang dihasilkan oleh akuntansi pemerintahan harus memungkinkan untuk terselenggaranya pemeriksaan dari aparat pengawas.

Dari keterangan diatas, dengan adanya akuntansi pemerintah, dapat membangun hubungan kepercayaan dengan baik antara pemerintah pusat maupun daerah dengan masyarakat melalui informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan tujuan umum berguna mensejahterakan masyarakat secara menyeluruh

2.1.3 Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintahan ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 untuk pengganti Peraturan

Pemerintah No.24 (Tahun 2005). Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan serta disusun mengacu pada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

Menurut Sinaga (2005) Standar Akuntansi Pemerintahan ialah pedoman buat menyatukan persepsi antara penyusun serta pengguna dan auditor. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Menurut Fakhrurazi (2010) manfaat yang diperoleh dari adanya Standar Akuntansi Pemerintahan adalah laporan keuangan yang dihasilkan guna memberikan informasi keuangan yang terbuka serta jujur dan menyeluruh kepada *stak holders*. Selain itu, didalam lingkup manajemen bisa meringankan fungsi perencanaan serta pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan dan digunakan sebagai acuan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah yang terdiri dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .

Adapun indikator-indikator yang terdapat pada standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dan alat untuk mengetahui tentang penyusunan dan penyajiannya ke dalam laporan keuangan pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

1. Penyajian Laporan Keuangan

Mardiasmo (2004:37) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah :

- a. Guna memberikan informasi yang dapat digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik, dan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan
- b. Guna memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai evaluasi kinerja manajerial dan organisasionalnya

Tujuan penyajian laporan keuangan sektor publik menurut *Governmental Accounting Standard Board* (1998) adalah sebagai berikut :

- a. Guna membantu memenuhi kewajiban pemerintah menjadi *akuntabel* secara publik.
- b. guna membantu mencukupi kebutuhan para pengguna laporan yang memiliki keterbatasan kewenangan, keterbatasan kemampuan/ sumber daya guna memperoleh informasi sebab itu mereka menyandarkan pada laporan sebagai sumber informasi penting.

Tujuan penyajian laporan keuangan dalam PSAP No. 1 adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general llpurpose financial lstatements*) dalam hal memperkuat keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran antar periode maupun antar entitas. Laporan keuangan bertujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan guna mencukupi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif. Guna mencapai tujuan itu, standar menetapkan semua pertimbangan didalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan didalamnya. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual.

Komponen-komponen yang terdapat dalam penyajian laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan *financial* sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut (Pernyataan No. 1 PP No.71/2010 paragraf 14) :

- a. Laporan realisasi anggaran
- b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih
- c. Neraca
- d. Laporan operasional
- e. Laporan arus kas
- f. Laporan perubahan ekuitas

g. Catatan atas laporan keuangan

2. Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas

PSAP No. 2 membahas tentang laporan realisasi anggaran berbasis kas. Laporan realisasi anggaran yang seterusnya disebut dengan LRA ialah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikembangkan, serta menggambarkan perbandingan diantara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan yang terdiri dari unsur pendapatan dan belanja.

PSAP No. 2 menjelaskan tentang informasi yang ada dalam Laporan Realisasi Anggaran, diantaranya mengenai realisasi pendapatan Laporan Realisasi Anggaran, belanja, transfer, surplus/defisit Laporan Realisasi Anggaran dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing di sandingkan dari anggarannya. Informasi tersebut berfungsi untuk para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan terkait alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- b. Memberikan informasi mengenai realisasi anggaran dengan menyeluruh yang berfungsi dalam mengevaluasi kinerja

pemerintah terkait efisiensi serta efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berfungsi untuk memprediksi sumber daya ekonomi yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran bisa menyediakan informasi kepada semua pengguna laporan tentang indikasi pendapatan dan penggunaan sumber daya ekonomi :

- a. Telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan hemat.
- b. Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD).
- c. Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyajian laporan realisasi anggaran ada unsur - unsur yang wajib dipenuhi, antara lain adalah :

- a. Pendapatan – LRA
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus / Defisit – LRA
- e. Pembiayaan
- f. Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran

3. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas melalui kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (Nomor 17 Tahun 2010) mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan tentang fungsi Laporan Arus Kas, yaitu :

- a. Mernyataan standar laporan arus kas ialah mengatur penyajian laporan arus kas dengan memberikan informasi historis terkait perubahan kas yang setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas sesuai aktivitas operasi serta investasi, pendanaan dan transitoris selama satu periode akuntansi.
- b. Fungsi pelaporan arus kas ialah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas yang setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Dalam paragraf 5, 6 dan 7 Pernyataan Standara Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 03 mengungkapkan bahwa Laporana Arus Kas berfungsi :

- a. Sebagai indikator jumlah arus kas dimasa mendatang, dan berguna sebagai menilai kecermatan dari taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.
- b. Sebagai alat pertanggungjawaban arus kasa masuk serta arus kas keluar selama masa pelaporan tertentu.
- c. Memberikan informasi yang bermanfaat untuk para pemakai laporan untuk mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas dana suatu entitas pelaporan serta struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Laporan Arus Kas, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan nomor 03 tertuang dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Aktivitas yang menjadi dasar dalam penyajian Laporan Arus Kas diantaranya sebagai berikut :

- a. Aktivitas operasi ialah kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan sebagai kegiatan operasional pemerintahan selama 1 periode akuntansi.
- b. Aktivitas investasi ialah kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas yang berfungsi sebagai perolehan dan pelepasan aset tetap dan investasi yang lain yang tidak termasuk dalam setara kas.
- c. Aktivitas pendanaan ialah kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan pada pemberian piutang

jangka panjang serta / pelunasan utang jangka panjang yang membuat perubahan dalam jumlah serta komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

- d. Aktivitas transitoris ialah kegiatan penerimaan, pengeluaran kas yang tidak tergolong dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Laporan arus kas berguna sebagai berbagai macam kepentingan. Informasi arus masuk serta keluar dalam laporan arus kas berfungsi untuk melihat transaksi kas dimasa lalu serta memprediksi arus kas di masa yang akan datang.

4. Catatan atas Laporan Keuangan

PSAP No.04 catatan atas laporan keuangan membahas mengenai beberapa hal yang akan dijelaskan diantaranya sebagai berikut.

Catatan atas LK diartikan agar laporan keuangan bisa dipahami oleh pembaca secara luas, tidak ada batasan hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. LK mungkin mengandung informasi yang bisa mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Maka dari itu, untuk menghindari kesalahpahaman dari penyajian laporan keuangan harus dibuat Catatan atas LK yang berisi informasi untuk mengampangkan pengguna dalam mencerna Laporan Keuangan.

Catatan atas Lk meliputi diantaranya penjelasan atas nilai suatu pos yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional serta Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Begitupun dalam Catatan atas LK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan SAP serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang berguna sebagai penyajian yang wajar atas LK.

Dalam rangka pengungkapan yang memadai, Catatan atas LK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Informasi umum mengenai entitas pelaporan serta entitas akuntansi
- b. Informasi mengenai kebijakan fiskal/keuangan serta ekonomi makro
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala serta hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
- d. Informasi mengenai dasar penyajian LK dan kebijakan - kebijakan akuntansi yang dipilih guna diterapkan transaksi - transaksi penting lainnya
- e. Rincian serta penjelasan masing-masing pos yang diberikan pada lembar muka laporan keuangan

- f. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan SAP yang belum disediakan dalam lembar muka laporan keuangan
- g. Informasi lainnya yang diperlukan sebagai penyajian yang wajar, yang tidak disediakan dalam lembar muka laporan keuangan

Pengungkapan kebijakan akuntansi harus mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip - prinsip akuntansi yang dipakai oleh entitas pelaporan beserta metode-metode penerapannya yang secara material mempengaruhi penyajian LRA, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional serta Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai

2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

1. Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan pemerintah daerah ialah informasi dengan memuat data berbagai bagian struktur kekayaan serta struktur informasi yang merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu. Istilah laporan keuangan pemerintah daerah meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengakui laporannya tersebut yang akan diakui bagian dari laporan keuangan.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2007:7)

“Laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Laporan keuangan lengkap meliputi neraca serta laporan laba dan laporan rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara, misalnya laporan arus kas / laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan merupakan bagian integral dari laporan keuangan”.

Menurut Munawir (2004:2) menjelaskan bahwa laporan keuangan pada dasarnya ialah hasil dari proses akuntansi yang bisa dipakai sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas dari perusahaan tersebut.

Mardiasmo A (2002:160) mengatakan bahwa lembaga pemerintah dituntut agar dbisa membuat laporan keuangan eksternal meliputi laporan keuangan formal seperti surplus defisit serta laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan neraca serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non finansial.

Pengguna laporan keuangan pemerintah Menurut A *International Federation of Accountants – Public Sector Comunitte* (IFAC-PSC) dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Badan legislatif serta badan-badan lain yang memiliki kekuasaan guna mengatur dan mengawasi. Badan legislatif ialah pengguna utama dari laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan tersebut akan memberikan informasi yang membantu guna dapat mengetahui bagaimana pemerintah mengurus sumber-sumber, ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan kondisi keuangan maupun kinerja.
- b. Rakyat. ialah kelompok terbesar dari pengguna laporan yang terdiri dari para pembayar pajak serta pemilih, dan kelompok-kelompok yang mempunyai ketertarikan khusus, memperoleh pelayanan serta manfaat dari pemerintah.
- c. Investor dan kreditor. Pemerintah harus memberikan informasi - informasi yang berfungsi untuk investor dan kreditor pemerintah. Pada akhirnya akan berguna untuk penilaian pemerintah dalam membiayai kegiatan-kegiatan serta memenuhi kewajiban pada komitmennya.
- d. Pemerintah lain, badan internasional serta penyedia sumber lain. Seperti para investor dan kreditor, badan internasional dan penyedia sumber lain yang menaruh ketertarikan terhadap kondisi keuangan pemerintah, terkait itu mereka juga menaruh perhatian khusus terhadap rencana - rencana dan kebijakan - kebijakan pemerintah.

- e. Analisis ekonomi dan keuangan. Para analis ekonomi dan keuangan termasuk media-media keuangan menjelajah, menganalisis serta menyebarkan hasil-hasilnya kepada para pengguna laporan lainnya. Mereka melaksanakan evaluasi masalah - masalah ekonomi dan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, bisa disimpulkan bahwa beban yang dipikul oleh suatu pelaporan sangat bervariasi karena semakin banyak informasi yang diharapkan baik oleh para pengambil keputusan ataupun rakyat sebagai pembayar pajak. Kebutuhan akan informasi itu dilatarbelakangi oleh tujuan - tujuan yang berbeda seperti ekonomi, sosial bahkan politik.

2. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

Karakteristik kualitas laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No.71 (Tahun 2010) terkait Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu ukuran - ukuran normatif yang perlu direalisasikan dalam informasi akuntansi sehingga bisa mencukupi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini ialah prasyarat normatif yang diharuskan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat mencukupi kualitas yang dikehendaki.

- a. Relevan. Laporan keuangan dapat dibilang relevan apabila informasi yang ada didalamnya bisa mempengaruhi keputusan pengguna sehingga membantu orang

mengevaluasi peristiwa masa lalu / masa kini serta memprediksi masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan bisa dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan adalah:

- Memiliki manfaat umpan balik. Informasi memungkinkan pemakai bisa menegaskan atau mengoreksi ekspektasi di masa lalu.
- Memiliki tujuan Aprediktif. Informasi dapat membuat pemakai bisa memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu serta kejadian masa kini.
- Tepat Waktu. Informasi disediakan tepat waktu agar bisa berpengaruh serta berguna dalam mengambil keputusan.
- Lengkap. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disediakan selengkap mungkin ialah meliputi semua informasi akuntansi yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan.

- b. Andal. Informasi termasuk laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan serta kesalahan material, menyediakan sikap fakta secara jujur dan bisat diverifikasi. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat/ penyajiannya

tidak dapat diandalkan maka pemakai informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disediakan/yang secara wajar bisa diharapkan guna disajikan.
 - Dapat diverifikasi. Informasi yang disediakan dalam laporan keuangan bisa diuji sehingga apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh orang yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh beda.
 - Netralitas. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum sehingga tidak berpihak pada kebutuhan/ kepentingan pihak tertentu.
- c. Dapat dibandingkan. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan akan lebih berguna bila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya/ laporan keuangan entitas pelaporan lainnya pada umumnya. Perbandingan bisa dilakukan secara internal dan eksternal.
- Perbandingan secara internal. Bisa dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.

➤ Perbandingan secara eksternal. bisa dilakukan bila entitas yang diperbandingkan ialah kebijakan akuntansi yang sama.

d. Dapat dipahami. Informasi yang disediakan didalam laporan keuangan bisa dipahami oleh pemakai dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Oleh karena itu, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan serta lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pemakai untuk mempelajari informasi tersebut.

3. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Standar Akuntansi Pemerintahan ialah prinsip akuntansi yang direalisasikan dalam menyusun serta menyediakan laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Dengan demikian SAP ialah persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam hal meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Selain itu menurut pendapat Deddi Nordiawan dalam Permana Irvan (2011:33) menyebutkan bahwa adanya pengaruh diantara standar akuntansi pemerintahan pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu :

“Standar Akuntansi Pemerintahan direalisasikan di ruang lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen - departemennya maupun di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah diyakini bisa berdampak pada kenaikan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah”.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan diyakini bisa berpengaruh pada penambahan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat maupun daerah. Dimana pada standar akuntansi pemerintah mempunyai empat indikator, diantaranya :

- a. Penyajian Laporan Keuangan
- b. Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
- c. Laporan Arus Kas
- d. Catatan atas Laporan Keuangan

Dimana keempat indikator dari standar akuntansi pemerintah diatas harus memenuhi karakteristik dari kualitas laporan keuangan. Adapun karakteristik tersebut diantaranya sebagai berikut :

- a. Relevan
- b. Andal
- c. Dapat dipahami
- d. Dapat dibandingkan

Secara keseluruhan pada indikator standar akuntansi pemerintah harus diukur dan memenuhi dari karakteristik kualitas laporan keuangan secara menyeluruh. Dengan demikian informasi keuangan pemerintahan akan bisa membuat dasar pengambilan keputusan pada pemerintahan serta juga terwujudnya transparansi dan akuntabilitas.

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan pedoman untuk pembuatan skripsi ini. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti terdahulu antara lain : Lilis Setyowati, Wikan Isthika (penelitian tahun 2014), Olga Yani Fransiska Singkali, Retnaningtyas Widuri (penelitian tahun 2014), Heni Nurani H dan Euis Eti Sumiyati (penelitian tahun 2014) dan Arif Ardi Kusumah (penelitian tahun 2012). Untuk lebih jelasnya hasil penelitian dari beberapa peneliti tersebut, bisa dilihat di tabel di bawah ini:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

Referensi, Nama	Variabel	Analisis Data	Hasil Penelitian
Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Semarang (Lilis Setyowati dan Wikan Isthika, 2014)	X1 =Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah X2 = Kompetensi Sumber daya Manusia X3 = Peran Internal Audit Y = Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Metode kualitatif dan metode kuantitatif	Secara parsial Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan daerah sedangkan variabel lainnya berpengaruh. Untuk pengujian secara simultan ketiga variabel Independen X berpengaruh terhadap

			variabel dependen Y.
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara (Olga Yani Fransiska S dan Retaningtyas Widuri, 2014)	X = Standar Akuntansi Pemerintah Y1 = Pendapatan Y2= Belanja Y3 = Pembiayaan	Metode kualitatif	Berdasarkan penelitian ini, evaluasi yang meliputi pengakuan dan pengukuran, pengungkapan dan penyajian atas pendapatan, belanja dan pembiayaan pada DPPKAD Kabupaten Toraja sudah sesuai dengan SAP yang berlaku
Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	X = Standar Akuntansi Pemerintah	Metode Kuantitatif	Berdasarkan pengujian hipotesis bahwa

<p>Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada SKPD/OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya) (Arif Ardi Kusumah, 2012)</p>	<p>Y = Kualitas Laporan Keuangan</p>		<p>penerapan standar Akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD/OPD di Pemerintahan Kota Tasikmalaya</p>
<p>Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey pada Pemerinta Daerah Jawa Barat) (Heni Nurani dan Euis Eti Sumiyati, 2014)</p>	<p>X = Standar Akuntansi Pemerintah Y = Kualitas Laporan Keuangan</p>	<p>Metode Kuantitatif</p>	<p>Menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) mempunyai pengaruh yang signifikan</p>

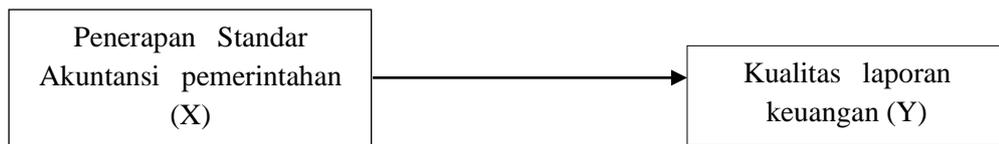
			terhadap kualitas laporan keuangan
--	--	--	--

Penelitian sekarang dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada SKPD Pemerintahan OKabupaten Jepara)” dengan variabel penelitian ialah: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan(X) dan Kualitas Laporan Keuangan(Y). Berdasarkan keterangan diatas dari penelitian terdahulu oleh Lilis Setyowati (2014) dan Olga Yani Fransiska S (2014) hanya melakukan penelitian pada 1 SKPD dan berdasarkan penelitian Arif Ardi Kusumah (2012) dilakukan di seluruh SKPD Tingkat Kota dan berdasarkan penelitian Heni Nurani H dan Euis Eti Sumiyati, 2014 subjek penelitian pada Inspektoral Kabupaten dalam Provinsi. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian yang sekarang yaitu dilakukannya survei pada seluruh SKPD Kab. Jepara.

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis

Dalam penelitian yang bermanfaat untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada SKPD Pemerintahan Kabupaten Jepara). Untuk lebih jelasnya dari kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.4. Perumusan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2009).

Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip akuntansi yang diterapkan untuk menyusun serta menyediakan laporan keuangan pemerintah pusat/ daerah. Dengan demikian standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Ketika penerapan standard akuntansi pemerintahan diterapkan dengan baik, maka akan berpengaruh baik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Hubungan dan keterkaitan antara standard akuntansi pemerintah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah dinilai baik dan mempunyai pengaruh yang positif juga harus diikuti oleh indikator dan karakteristik yang terdapat didalamnya.

Penyajian laporan keuangan pemerintah dalam penerapannya bisa dikatakan dan dinilai baik jika memenuhi karakteristik relevan andal serta

dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Ketika karakteristik tersebut dapat terpenuhi maka dapat menghasilkan pengaruh positif dan menunjukkan hasil yang baik.

Berdasarkan pokok permasalahan serta tujuannya, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut

H₁ : Ada tidaknya pengaruh antara kedua variable yaitu penerapan standar akuntansi pemerintahan sebagai variabel independen dengan kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen.

H₂ : Diduga Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

